

"PROFESIONAL, PRODUKTIF, INOVATIF DAN BERKUALITAS"



RENCANA AKSI

*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT*

TAHUN 2026

Bapperida adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yaitu lembaga pemerintah daerah di Indonesia yang merupakan transformasi dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) atau BAPPEDALITBANG, dengan tugas utama membantu kepala daerah dalam menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah, serta mengembangkan riset dan inovasi untuk pembangunan yang lebih kreatif dan relevan dengan tantangan zaman



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerah - Nya Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, telah dapat disusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk mengevaluasi sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Kuala Tungkal, Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



FERI NOPRIANTO,SE

Pembina Tk I

NIP. 19731116 200003 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Sistematika Penulisan.....	2
1.4 Landasan Hukum.....	2
BAB II RENCANA AKSI	4
2.1 Rencana Strategis	4
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	7
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	10
2.4 Rencana Aksi.....	16
BAB III PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029.....	6
TABEL 2.2	Indikator Kinerja Utama(IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029.....	8
TABEL 2.3.1	Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II dan III Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 – 2029	10
TABEL 2.3.2	Perjanjian Kinerja Eselon IV/Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 – 2029	11
TABEL 2.3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 – 2029	14
TABEL 2.4	Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 – 2029.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2026 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2026 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2026;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Rencana Aksi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 - 2029, Perjanjian Kinerja tahun 2026 dan Rencana Aksi.
Bab III Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi

1.4 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25);
 8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 33).

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2025 - 2029, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah menetapkan Visi ***“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”***

Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Inovatif.

- 1) **Berkualitas** : Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang “Berkah Madani”. SDM yang unggul akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan persaingan global;
- 2) **Ekonomi Maju** : Pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan merupakan landasan utama dalam pencapaian visi Berkah Madani Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui pilar Ekonomi Maju, pemerintah daerah menitikberatkan pada strategi peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan daya saing daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- 3) **Religius** : Nilai-nilai religius menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang berintegritas, bermoral, dan harmonis. Pilar Religius dalam visi Berkah Madani menegaskan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun karakter masyarakat dan aparatur yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta menjadikan toleransi antarumat beragama sebagai kekuatan sosial dalam menjaga persatuan dan kedamaian.

- 4) **Kompetitif** : Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan produk unggulan yang berbasis potensi lokal. Pilar Kompetitif dalam visi Berkah Madani mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan akses pasar produk produk daerah agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
- 5) **Aman dan Harmonis** : Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam visi Berkah Madani, pilar Aman dan Harmonis diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil, damai, serta menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
- 6) **Mandiri** : Kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola potensi sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan eksternal. Dalam visi Berkah Madani, pilar Mandiri menekankan pada upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, baik secara fiskal, ekonomi, maupun sosial.
- 7) **Inovatif** : Inovasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam visi Berkah Madani, unsur Inovatif diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan ekosistem pembangunan yang responsif terhadap perubahan, berbasis pada kreativitas, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2026 - 2029 sbb :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi II : ***“BERKAH Dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”*** dengan tujuan ” ***Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan***

publik yang berintegritas dan adaktif “.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 – 2029 Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI		
MISI II : BERKAH Dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Meningkatkan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak eksternal. - Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan - Peningkatan kompetensi dan budaya kerja - Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	- Meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan - Melakukan pengendalian terhadap indikator dan target kinerja program pembangunan daerah di seluruh OPD
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan	- Penyelarasan antar dokumen baik vertikal maupun horizontal - Integrasi perencanaan dan penganggaran - Penguatan monitoring dan evaluasi - Pemanfaatan data berbasis elektronik - Peningkatan kapasitas SDM
	Meningkatnya Inovasi Daerah	- Membangun ekosistem inovasi - Integrasi Inovasi dengan Kinerja dan Penganggaran - Digitalisasi dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, Bapperida mengambil kebijakan dalam Pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan digunakan untuk periode tahun 2025 - 2029 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 0007/2/BAPPERIDA/I/SRK/2026 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah seperti berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Meningkatnya keselarasan dan Capaian kinerja perencanaan	Persentase Capaian Kinerja Sesuai Perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ (A = realisasi dokumen perencanaan Dan pelaporan tepat waktu dibagi B = jumlah dokumen yang direncanakan di kali 100% ditambah C = realisasi dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang – undangan dibagi D = jumlahdokumen yang di rencanakan di kali 100% di tambah E = tingkat realisasi evaluasi/review dokumen perencanaan di bagi F = jumlah evaluasi yang harus dikerjakan di kali 100%) di bagi tiga	RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA.	BAPPERIDA	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta peaksanaan evaluasi dokumen perencanaan
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ (A = Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam dibagi B = jumlah OPD lingkup ekonomi dikali 100% ditambah C = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sospem dibagi D = jumlah OPD lingkup sospem di kali 100% ditambah E = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan linkup saspras dibagi F = jumlah OPD lingkup saspras dikali 100%) di bagi tiga			Pelaksanaan asistensi, pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan

2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sesuai Perencanaan	$\frac{A}{B} \times 100 \%$ (A = Tingkat realisasi evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang harus dikerjakan dibagi B = jumlah perangkat daerah yang menyampaikan dokumen evaluasi dikali seratus)	Evaluasi Renja E.81, Evaluasi Renstra	BAPPERIDA	Penyusunan evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan dan 5 (lima) tahunan
3	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Badan Riset Nasional	Dokumen Inovasi	BAPPERIDA	Penilaian Dokumen Inovasi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda	Hasil Survey Bagian Organisasi	Hasil Survey	BAPPERIDA	Pelaksanaan Survey
		Nilai AKIP Bappeda	Penilaian inspektorat	LHE AKIP Inspektorat	BAPPERIDA	Pemenuhan Dokumen

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka Bappeda menjalankan program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam RKA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Sebagai bukti pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tahun 2025 Bapperida menyusun Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang terdiri dari empat sasaran strategis yang dibagi menjadi dua, yaitu satu sasaran untuk menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan di lingkup Bapperida dan tiga sasaran strategis dalam mendukung kinerja daerah yang dirinci beserta targetnya pada tahun 2026, sebagaimana pada Tabel dibawah ini:

Tabel. 2.3.1
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon II dan III
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	TARGET 2026	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IK1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda			81,5	Kepala Bapperida (Ess II)
	IK2	Nilai AKIP Bappeda			87	Kepala Bapperida (Ess II)
		(IK 1,2)	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	Sekretaris (Ess III)
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	IKU1	Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai Perencanaan (Persen)			77%	Kepala Bapperida (Ess II)
		(IKU1)	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	Kabid PPED (Ess III)
SASARAN STRATEGIS 2.	IKU2	Persentase Capaian Kinerja sesuai Perencanaan (Persen)			92%	Kepala Bapperida

Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan (Persen)			92%	(Ess II)
	(IKU2)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang (Perekonomian dan SDA), (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), (Infrastruktur dan kewilayahan)		92%	Kabid Infrastwil Kabid Eko dan SDA Kabid PPM (Ess III)
	IKU3	Indeks Inovasi Daerah			42.8%	Kepala Bappeda (Ess II)
	(IKU3)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	Inovatif		Kabid Riset dan Inovasi Daerah (Ess III)

Tabel. 2.3.2
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon IV/Fungsional
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	TARGET 2026	PENANGGUNG JAWAB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran lingkup Bappeda	100%	Kepala Badan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	100%	Sekretaris Badan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	Perencana Ahli Muda /Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Perencana Ahli Muda /Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA)
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Perencana Ahli Muda /Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 dokumen	Perencana Ahli Muda /Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	Sekretaris Badan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Pelaksana Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Pelaksana Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Pelaksana Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Sekretaris Badan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Sekretaris Badan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Sekretaris Badan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Tepat Waktu	100%	Kepala Badan
Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Pendanaan	100%	Kabid Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Daerah

Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	2 BA	Perencana Ahli Muda
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	Perencana Ahli Muda
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	Perencana Ahli Muda
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Kabid Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Perencana Ahli Muda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Wilayah	92%	Kepala Badan
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Pemerintahan Pembangunan Manusia	92%	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Perencana Ahli Muda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Perencana Ahli Muda
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	92%	Kabid Perekonomian dan SDA
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Perencana Ahli Muda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	Perencana Ahli Muda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Perencana Ahli Muda
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Wilayah	92%	Kabid Infrastruktur dan Wilayah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Perencana Ahli Muda

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 PD	Perencana Ahli Muda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Perencana Ahli Muda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 PD	Perencana Ahli Muda
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	Inovatif	Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah	>20	Kabid Riset dan Inovasi
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Perencana Ahli Muda

Tabel 2.3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2026

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PENETAPAN FINAL RKA 2026
5.01	PERENCANAAN		6.604.458.323
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	6.284.193.923
5.01.01.2.01.	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	20.006.000
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.000
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.490.000
5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	576.000
5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	312.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	4.457.633.323
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.179.088.323
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.840.000
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.705.000

5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.095.800
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.150.000
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66.436.600
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33.750.000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17.942.000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.817.200
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.178.800
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	153.775.000
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	670.403.800
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.280.000
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	332.890.000
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107.390.000
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51.000.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	37.288.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	22.588.000
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	6.350.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8.150.000
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8.088.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	14.700.000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	14.700.000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	259.342.400
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan pembangunan manusia	14.410.000
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.730.000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.680.000

5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	132.272.400
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.210.000
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.172.400
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	56.890.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayah	112.660.000
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.890.000
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	10.360.000
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.610.000
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8.800.000
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	23.634.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah	23.634.000
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	23.634.000

2.4 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 yang dituangkan secara berkala (perbulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

[illegible]

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN											
				TR	TR	TR	TR							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
				1	2	3	4							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	8.800.000	Perencana Ahli Muda	Asistensi Rancangan Renja OPD TA 2027												
													Asistensi Ranhia Renja OPD 2027												
													Asistensi Renja OPD TA 2027												
													Asistensi Ranhia Renja Perubahan OPD TA 2027												
													Asistensi Renja Perubahan OPD TA 2027												
4	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	43	-	-	42,8	-	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	23.634.000	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Inovatif/Sangat Inovatif	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	-	-	-
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah data inovasi daerah	>20	23.634.000	Fungsi Lingkup Inovasi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	-	-	-
								- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	23.634.000	Perencana Ahli Muda	Pengumpulan dan pengelolaan data Kelitbangan												
											6.604.458.323														

Kuala Tungkal, Januari 2026
KEPALA BAPPERIDA KAB. TANJAB BARAT

FERI NOPRIANTO, SE
PEMBINA TR
NIP. 19701116 200003 1 002

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2026 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Kuala Tungkal, Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



FERI NOPRIANTO, SE

Pembina Tk I

NIP. 19731116 200003 1 013